

Parody in “Terminal” Rubric on the *Mojok.co* Site

Parodi dalam Rubrik “Terminal” pada Situs *Mojok.co*

Wiwin Sulistyorini*, Karkono

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia

*Penulis korespondensi, Surel: wiwin.sulistyorini.1702126@students.um.ac.id

Paper received: 02-09-2021; revised: 14-09-2021; accepted: 25-09-2021

Abstract

This research was conducted to determine the topic, meaning, and function of parody contained in the "Terminal" rubric on the Mojok.co website. The "Terminal" rubric contains a collection of articles submitted by Mojok.co contributors consisting of several categories, namely gaya hidup, hiburan, pojok tubir, kampus, politik, media sosial, nusantara, and luar negeri. This research is qualitative research that uses documentation techniques for data collection. There are two theories used in this research, Teun van Dijk's theory of critical discourse analysis for topics and meaning analysis, and M.A.K. Halliday's theory of language functions for function analysis. The results of this study indicate that there are three parody topics discussed in the article "Terminal" rubric, namely the Omnibus Law, the performance of politicians, and historical truth in a documentary. The meaning of parody in the article rubric "Terminal" is relevant to the situation, events, and political figures in Indonesia. There are seven parody functions found in the "Terminal" rubric article, namely instrumental function, regulatory function, representation function, interactional function, heuristic function, personal function, and imaginative function

Keywords: parody, topic, meaning, function

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui topik, makna, serta fungsi parodi yang terdapat dalam rubrik "Terminal" pada situs Mojok.co. Rubrik "Terminal" berisi kumpulan artikel yang dikirimkan oleh kontributor Mojok.co yang terdiri dari beberapa kategori, yakni gaya hidup, hiburan, pojok tubir, kampus, politik, media sosial, nusantara, dan luar negeri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik dokumentasi untuk pengambilan data. Terdapat dua teori yang digunakan dalam penelitian ini, yakni teori analisis wacana kritis van Dijk untuk analisis topik dan makna, serta teori fungsi bahasa M.A.K. Halliday untuk analisis fungsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga topik parodi yang dibahas dalam artikel rubrik "Terminal", yakni Undang-Undang Omnibus Law, kinerja politisi, serta kebenaran sejarah dalam sebuah film dokumenter. Makna parodi dalam artikel rubrik "Terminal" relevan dengan situasi, peristiwa, serta tokoh politik di Indonesia. Terdapat tujuh fungsi parodi yang ditemukan dalam artikel rubrik "Terminal", yakni fungsi instrumental, fungsi regulasi, fungsi representasi, fungsi interaksional, fungsi heuristik, fungsi personal, dan fungsi imajinatif.

Kata kunci: parodi, topik, makna, fungsi

1. Pendahuluan

Media informasi yang semakin banyak dan meluas di kalangan masyarakat menjadi bukti adanya percepatan arus informasi yang tersebar di masyarakat. Kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat dan aktual mendorong lahirnya media informasi berbasis digital. Maraknya media informasi konvensional yang merambah ke konsep digital menimbulkan persaingan untuk mendapatkan pembaca. Berbagai inovasi dalam penyajian informasi dikembangkan, mulai dari segi penampilan hingga gaya penulisan. Salah satu gaya penulisan yang menarik untuk dikaji adalah parodi. Parodi merupakan cara menanggapi secara evaluatif apa yang disampaikan orang lain. Kritikus asal Kanada, Linda Hutcheon,

mendefinisikan parodi sebagai imitasi dengan jarak kritis atau pengulangan dengan perbedaan (dalam Kostka, 2016).

Salah satu media informasi berbasis digital yang memiliki gaya penulisan menarik adalah situs *Mojok.co*. Media informasi yang dikepalai oleh Puthut E.A. tersebut telah berdiri sejak 28 Agustus tahun 2014. Situs *Mojok.co* tercatat sebagai salah satu media yang memiliki konten-konten bernada kritik sebagai salah satu ciri khasnya. Artikel dalam situs *Mojok.co* tidak hanya ditulis oleh redaktur, namun juga dikirim oleh beberapa kontributor. Artikel-artikel yang kritis sekaligus humoris merepresentasikan slogan yang diusung situs *Mojok.co*, “Sedikit Nakal, Banyak Akal”. Salah satu rubrik yang terdapat pada situs *Mojok.co* adalah rubrik Terminal. Rubrik ini berisi kumpulan artikel yang dikirimkan oleh kontributor *Mojok.co* yang terdiri dari beberapa kategori, yakni gaya hidup, hiburan, pojok tubir, kampus, politik, media sosial, nusantara, dan luar negeri. Rubrik ini mengunggah sedikitnya sepuluh hingga dua puluh artikel setiap hari. Hal ini mengindikasikan bahwa rubrik “Terminal” merupakan rubrik yang banyak diminati oleh pembacanya dan memiliki kontributor yang aktif mengirimkan tulisan.

Penelitian tentang parodi pernah dilakukan oleh Purnomo Sidik Kustiyono (2010) dengan judul “Strategi Resistensi terhadap Budaya Populer pada Kolom ‘Parodi’ Samuel Mulia di Harian Kompas (Sebuah Analisis Wacana Kritis)”. Penelitian tersebut mengkaji representasi budaya populer, bentuk intertekstualitas parodi budaya populer, serta parodi sebagai sebuah strategi wacana terhadap identitas budaya populer bekerja sebagai bentuk perlawanan. Penelitian dengan fokus parodi juga pernah dilakukan oleh Rusyda Ulva (2014) dengan judul “Dara Jingga, Wisran Hadi: Parodi Terhadap Kekuasaan (Dara Jingga, Wisran Hadi: *a Power Parody*)”. Dengan menggunakan teori parodi postmodern model Linda Hutcheon, Rusyda mengkaji makna-makna implisit dan eksplisit sebagai interpretasi baru dari penyimpangan cerita mitos dan teks sejarah yang menjadi latar penciptaan lakon Dara Jingga.

Parodi sebagai strategi penyampaian informasi menarik untuk dikaji dalam fungsinya sebagai media kritik implisit. Penelitian ini memiliki sejumlah perbedaan dengan kajian lain dengan fokus parodi yang pernah dilakukan. Kajian ini menitikberatkan pada analisis makna dan fungsi parodi dalam sebuah wacana. Dengan mengungkap makna berdasarkan konteksnya, akan dapat diketahui kritik atau pesan tersirat di dalamnya. Analisis topik juga menjadi salah satu pertimbangan untuk mengetahui wacana apa saja yang kerap diparodikan dan apakah topik tersebut berkaitan dengan fungsi penciptaan parodi.

Berdasarkan konteks yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki tiga fokus, yakni (1) topik parodi yang terdapat dalam rubrik “Terminal” pada situs *Mojok.co*, (2) makna parodi yang terdapat dalam rubrik “Terminal” pada situs *Mojok.co*, (3) fungsi parodi yang terdapat dalam rubrik “Terminal” pada situs *Mojok.co*.

2. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam (Moleong, 2010). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni data deskriptif yang berupa kata, frasa, klausa, kalimat, atau teks yang mengandung unsur parodi pada artikel yang terdapat dalam rubrik “Terminal” Mojok.co. Sumber data dalam penelitian ini adalah teks-teks artikel dalam rubrik “Terminal” Mojok.co yang diunggah pada tanggal 7-15 Oktober 2020.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi yang terdiri dari tiga langkah, yakni pencarian dan pengumpulan data, peninjauan data, serta pencatatan data. Instrumen kunci dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2013). Selain instrumen kunci, digunakan pula instrumen pendukung berupa tabel analisis.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori analisis wacana kritis Teun van Dijk yang dipadukan dengan teori fungsi bahasa M.A.K. Halliday. Menurut van Dijk, wacana memiliki tiga dimensi atau bangunan, yakni teks, kognisi sosial, dan konteks sosial (Eriyanto, 2011). Berkaitan dengan fokus dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, analisis data akan dilakukan pada level atau dimensi teks. Teun A. van Dijk membagi teks ke dalam tiga struktur atau tingkatan, yakni (1) struktur makro yang merupakan makna global dari suatu teks yang diamati dari topik/tema yang diangkat oleh suatu teks; (2) superstruktur, yakni struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka teks, bagaimana suatu teks disusun secara utuh; (3) struktur mikro yang merupakan makna lokal dari suatu teks yang dapat diamati dari pilihan kata, kalimat, dan gaya yang dipakai oleh suatu teks. Sementara teori fungsi bahasa digunakan untuk menganalisis fungsi parodi dalam artikel. Fungsi bahasa dapat diartikan sebagai cara menggunakan bahasa, yakni penggunaan bahasa sebagai sarana komunikasi yang memiliki tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Halliday (dalam Sumarlam, 2003) mengklasifikasikan fungsi bahasa ke dalam tujuh fungsi, yakni fungsi instrumental, fungsi regulasi, fungsi representasi, fungsi interaksional, fungsi heuristik, fungsi personal, dan fungsi imajinatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan tujuh artikel dalam rubrik “Terminal” yang menggunakan gaya penulisan parodi. Tujuh artikel tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Data Artikel Parodi

Kode Artikel	Judul Artikel	Tanggal Unggah
AP1	Seandainya Sherlock Holmes Tinggal di Indonesia dan Ikut Melawan Omnibus Law	7 Oktober 2020
AP2	Film Pengkhianatan Uchiha’ dan Bahaya Kebangkitan Akatsuki	8 Oktober 2020
AP3	Negeri Wano Ternyata Sudah Lama Terapkan Omnibus Law, Ini Dampak Positifnya	8 Oktober 2020
AP4	Menebak ke Mana Hilangnya Mayor Thomas, Presiden Mineral Town yang Sering Blusukan	11 Oktober 2020
AP5	Sekolah Superhero Pengecut, Tutup Pagar Saat Murid Akan Konsolidasi	12 Oktober 2020
AP6	Menanti Demonstrasi Besar yang Dilakukan oleh Pasukan Revolusi One Piece	15 Oktober 2020
AP7	Politisi Konoha: Bersih, Rakyat, dan Kerja Nyata, tapi Budek juga	19 Oktober 2020

3.1. Topik Parodi

Topik merupakan elemen yang terdapat pada tingkatan struktur makro. Elemen topik menggambarkan makna global atau makna umum dari suatu teks. Topik memberikan gambaran tentang gagasan utama yang dikedepankan penulis dalam memandang suatu peristiwa (Eriyanto, 2011). Topik umum dapat terbentuk dari beberapa subtopik yang saling kait dan mendukung satu sama lain. Setiap subtopik diturunkan ke dalam serangkaian fakta yang dapat diruntut dari kata-kata kunci yang digunakan dalam setiap kalimat atau paragraf. Keseluruhan subbagian tersebut saling mendukung dan membentuk teks koheren yang utuh. Topik dapat diartikan sebagai pokok pembicaraan (Mulyana, 2005) yang berbentuk frasa maupun kalimat. Tingkat kejelasan topik berpengaruh terhadap kejelasan struktur dan isi wacana.

Berdasarkan data yang dihimpun, ditemukan hasil bahwa terdapat tiga topik parodi yang dibahas dalam artikel rubrik “Terminal”, yakni Undang-Undang *Omnibus Law*, kinerja politisi, serta kebenaran sejarah dalam sebuah film dokumenter.

3.1.1. Topik Undang-Undang *Omnibus Law*

Artikel dengan topik Undang-Undang *Omnibus Law* membahas tiga isu, yakni polemik pengesahan, dampak penerapan, hingga berbagai aksi penolakan yang dilakukan baik melalui media massa maupun aksi turun ke jalan atau demonstrasi. Isu perihal polemik pengesahan *Omnibus Law* ditemukan pada artikel (AP1). Pengesahan *Omnibus Law* berpolemik karena adanya beberapa hal yang dinilai janggal selama proses pengesahan. Pertama, adanya upaya membungkam opini yang bertentangan dengan cara mematikan mikrofon fraksi yang melakukan sanggahan. Kedua, jadwal pengesahan yang dipercepat dan dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Hal tersebut ditunjukkan melalui kutipan berikut.

- (1) Hal pertama yang ditelusuri oleh Sherlock adalah sidang anggota DPR yang betul-betul menyebalkan. Sanggahan dari fraksi partai lain tidak diperbolehkan. Selain suara rakyat, ternyata suara rekan sesama politisi pun dibungkam saat ingin memberi interupsi dengan cara mematikan microphone.
- (2) Hal kedua adalah terkait perubahan jadwal sidang yang mendadak diubah dari yang sebelumnya tanggal 8 Oktober menjadi 5 Oktober. Apakah Omnibus Law betul-betul semendesak itu? Wajar jika Sherlock langsung memikirkan tentang apa agenda dibalik hal tersebut. Padahal, saat ini kasus penyebaran Covid-19 masih belum bisa diselesaikan dengan baik. Urgensinya apa, Wahai pemimpin?

Isu kedua, yakni aksi penolakan *Omnibus Law* ditemukan pada artikel (AP5) dan artikel (AP6). Penolakan yang diceritakan dalam artikel (AP5) dilakukan secara langsung melalui aksi demonstrasi dan konsolidasi. Demonstrasi besar dilakukan untuk menolak sebuah aturan baru karena dinilai merugikan para buruh. Namun aksi konsolidasi terhambat oleh adanya aturan dan imbauan yang berisi larangan untuk melakukan demonstrasi, serta adanya aksi penutupan akses masuk di saat konsolidasi akan dilakukan. Berikut adalah kutipan yang menunjukkan topik perihal isu penolakan.

- (3) Demo besar yang melibatkan antar sekolah kemarin, menuntut keadilan pemerintah dalam menyediakan peraturan yang adil bagi tiap superhero.
- (4) Aturan berikutnya dari Kemem mengatakan, para guru harus senantiasa mendukung para muridnya untuk melakukan kegiatan yang berhubungan

dengan akademik. Diperjelas lagi, para siswa tidak diperbolehkan mengikuti aksi demonstrasi.

- (5) Tambah menggelikan, Kepala Sekolah saya yang memiliki quirk seperti tikus, sore tadi menutup akses masuk untuk para siswa. Padahal, hari ini konsolidasi akan dilakukan oleh kelas 1-A yang dipimpin oleh wali kelas kami, Eraser Head.

Sementara aksi penolakan yang dibahas dalam artikel (AP6) dilakukan dengan dua cara, yakni aksi demonstrasi dan aksi penolakan melalui media massa. Aksi penolakan tersebut dituangkan dalam kutipan-kutipan berikut.

- (6) Mereka bercuit di Twitter dan membangun tagar mulai dari #MosiTidakPercaya hingga #WorldGovernmentKontrol.
- (7) Ivankov, selaku dewan terhormat, bisa juga melancarkan aksi sporadis berupa berkomentar di akun @WorldGovernment_OP dengan puisi indah Wiji Thukul, “Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: LAWAN!”
- (8) Pasukan Revolusi juga akan vis-à-vis dengan BuzzerRp dari World Government. Lha iya to, nggak asik kalau nggak ada lawan di media sosial.
- (9) Mereka siap kapan saja. Turun ke jalanan. Water cannon? Tenang saja, Jinbe dan kolega malah senang jika disemprot air. Gas air mata? Tenang, Sanji sudah khatam babagan tangis dan derai air mata.

Isu ketiga, yakni dampak penerapan *Omnibus Law* ditemukan pada artikel (AP3). Artikel (AP3) membahas tentang penerapan *Omnibus Law* di Negeri Wano. Aturan setebal 900 halaman tersebut dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Wano. Penerapan *Omnibus Law* di Negeri Wano dinilai hanya menguntungkan investor dan pemerintah, sementara para buruh menjadi pihak yang dirugikan. Topik tersebut diuraikan ke dalam tiga subtopik, yakni dampak bagi pemerintah dan para cukong, dampak bagi alam, serta dampak bagi rakyat terutama para buruh. Subtopik-subtopik tersebut didukung dengan serangkaian fakta yang terdapat dalam kutipan berikut.

- (10) Kedua, *Omnibus Law* menguntungkan cukong. Melalui keuntungan cukong, negara juga mendapat untung. Tunggu dulu, bukan masyarakat Wano keseluruhan yang untung, tapi hanya sebagian kecil “rakyat” saja yang untung. Lagi-lagi, si perwakilan rakyat Wano atau ASU inilah yang untung.
- (11) Sedangkan Kabupaten Kuri, kini seakan menjadi gundukan gunung lantaran tercemar oleh pabrik senjata yang didukung penuh oleh pemerintah. Sungai-sungai air tawar tercemar limbah berbahaya.
- (12) Banyak buruh di Kota Bakura—pusat Beast Pirates—merana. Aturan ini kian memberatkan mereka. Contohnya nggak ada lagi cuti-cuti (mereka menganggap cuti itu nggak penting), gampang di-PHK, cuti haid nggak ada soalnya (katanya ASU) nggak penting, cuti melahirkan apalagi, pekerjaan Pabrik Smile yang menggunakan sistem kontrak jadi mudah meng-PHK dan semena-mena.

3.1.2. Topik Kinerja Politisi

Terdapat dua artikel yang membahas topik kinerja para politisi, yakni artikel (AP4) dan (AP7). Artikel (AP7) membahas kondisi politik di Konoha sesuai pemilihan *hokage* (pemimpin tertinggi). Diceritakan bahwa kondisi politik di Konoha usai pemilihan *hokage* sedang memanas. Terjadi demonstrasi dan protes yang dilakukan untuk menuntut keadilan. Kinerja politisi Konoha juga dinilai nihil, mulai dari Naruto yang awalnya dikenal sederhana dan merakyat mulai tergeser dengan label kapitalis dan otoriter; Boruto yang berambisi mengikuti

jejak ayahnya menjadi seorang politisi; Shikamaru yang lebih sering menghilang dan banyak diam; Danzo yang seakan mengambil alih tugas Shikamaru; dan Sakura yang melakukan tindakan *nyeleneh* dalam menangani wabah virus. Topik tersebut didukung dengan serangkaian fakta yang terdapat dalam kutipan berikut.

- (13) Politik dinasti baru serta bagi-bagi kekuasaan lebih nyata terlihat di periode ini. Shinobi yang nggak kompeten pun dipertahankan.
- (14) Entah, sadar atau nggak, beliau itu adalah politisi Konoha yang seharusnya membantu tugas dari Hokage. Tapi, beliau malah sering hilang entah kemana. Walaupun hanya sekadar menyapa rakyat Konoha saja jarang.
- (15) Sakura yang kinerjanya sedari awal dalam menangani kasus ini rada nyeleneh, malah lebih sering hilang dibanding mengupayakan langkah konkret untuk penanganan virus ini.
- (16) Kebijakan yang terkesan terpecah belah dan ditangani oleh berbagai bidang institusi serta nihilnya “kehadiran” Sakura sebagai pemegang kewenangan hanya sebagian wajah kusut penanganan pandemi di Konoha.

Sementara itu, artikel (AP4) hanya fokus membahas satu politisi, yakni presiden bernama Mayor Thomas. Topik yang diangkat dalam artikel tersebut adalah nihilnya kehadiran seorang pemimpin saat masyarakat membutuhkan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan citra yang dibangun sebelumnya, yakni sosok yang dekat dengan rakyat. Diceritakan bahwa Mayor Thomas adalah sosok yang dikenal bersahaja, suka bagi-bagi afeksi, memiliki kebiasaan blusukan, serta kerap berkomunikasi dengan rakyatnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Mayor Thomas adalah sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat. Namun, di saat rakyat meminta penjelasan mengenai beberapa konflik di Mineral Town, dan undang-undang yang ditetapkan bawahannya, tidak terlihat kehadiran Mayor Thomas untuk melakukan dialog massa dengan rakyat. Topik tersebut dipertegas melalui kutipan-kutipan berikut.

- (17) Namun, beberapa kali kita seakan susah mencari blio di saat keadaan genting. Blio memang gila kerja karena mengusung semboyan mantap, yakni “ngerjain, ngerjain, ngerjain!”. Tapi, bukan berarti ketika masyarakat Mineral Town mencari blio malah blionya nggak ada, dong?
- (18) Ke mana hilangnya Mayor Thomas? Bukankah seorang pemimpin, ketika masyarakat butuh bantuan dan kejelasan, ia hadir dan melakukan dialog massa? Sejatinya kita bisa cari blio mulai dari tempat favorit ia blusukan. Lho, iya to, ketika butuh suara ia mendekati rakyat, mengunjungi rumah ke rumah, mosok waktu dibutuhkan blio menghilang?
- (19) Ketika Mayor Thomas susah dicari, mungkin ia ke sini. Sambil mengingat kejadian ketika ia orasi dan kampanye, mengundang para artis ternama ibukota Mineral Town, menyatakan janji setia untuk mensejahterakan rakyat. Nggak mungkin kan ia ingkar? Nggak mungkin kan ia ke tempat yang ramai massa hanya kala kampanye saja? Blio bukan pemimpin ingkar.

3.1.3. Kebenaran sejarah dalam sebuah film dokumenter

Topik kebenaran sejarah dalam sebuah film dokumenter ditemukan pada artikel (AP2). Artikel (AP2) menceritakan tentang penayangan sebuah film dokumenter di stasiun televisi bernama Konoha TV. Penayangan film dokumenter berjudul *Pengkhianatan Uchiha*’ tersebut menuai pro-kontra karena cerita dalam film tersebut dinilai tidak sesuai dengan realita atau sejarah yang terjadi sesungguhnya. Film tersebut menceritakan tentang pembunuhan beberapa tokoh terkemuka di Konoha yang akhirnya berujung tindakan pembantaian massal pada Klan Uchiha, yakni klan yang dituduh sebagai dalang aksi pembunuhan. Film tersebut

kemudian dipertontonkan dari generasi ke generasi atas suruhan Danzo yang saat itu menjabat sebagai *hokage* (pemimpin tertinggi). Topik utama dalam artikel tersebut juga dipertegas dengan pengulangan kata-kata kunci pada data berikut.

- (20) Padahal, menurut kajian sejarah, film yang dibuat selama Pemerintahan Danzo—yang menjabat saat itu—hanya fiksi dan jauh akan realitas sesungguhnya.
- (21) Banyak yang protes penayangan film ini bisa merusak sejarah sesungguhnya Desa Konoha.
- (22) Selama Itachi memutuskan pergi, Sasuke memupuk dendam, Danzo membuat film fiktif Pengkhianatan Uchiha dengan Akatsuki sebagai organisasi terlarang.

3.2. Makna Parodi

Artikel (AP1) memparodikan kondisi politik di Indonesia yang saat ini sedang bergejolak karena polemik pengesahan kebijakan *Omnibus Law*. Artikel tersebut menunjukkan adanya upaya menentang *Omnibus Law*. Diksi *melawan* pada judul yang digunakan mengindikasikan adanya unsur ketidaksetujuan terhadap *Omnibus Law* yang berusaha disampaikan melalui artikel tersebut. Judul tersebut didukung dengan struktur penulisan yang menonjolkan atau menekankan informasi tentang respons warganet berupa penolakan terhadap *Omnibus Law* yang diletakkan pada paragraf pertama. Berikut kutipan paragraf pertama artikel (AP1).

- (23) Pada pagi hari, tanggal 6 Oktober 2020, Sherlock Holmes sedang duduk santai sambil menikmati cerutu dan melihat lini masa Twitter melalui hape pintarnya. Ia tidak merasa heran dengan banyaknya tagar bermunculan bertema penolakan serta makian terhadap *Omnibus Law* yang baru saja disahkan sehari sebelumnya. Terang saja, sebab, hal tersebut betul-betul timpang dan menyengsarakan kaum pekerja dan buruh.

Frasa *tidak merasa heran* pada kutipan tersebut menunjukkan pemakluman terhadap aksi penolakan *Omnibus Law* yang dilakukan di media sosial. Kalimat terakhir kutipan tersebut secara implisit menyatakan sikap setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh warganet yang menentang pengesahan *Omnibus Law* dan menunjukkan ketidakberpihakan penulis pada pemerintah. Sikap ketidakberpihakan juga terlihat dari adanya upaya memaparkan kejanggalan-kejanggalan selama proses pengesahan *Omnibus Law* dalam kutipan berikut.

- (24) Hal pertama yang ditelusuri oleh Sherlock adalah sidang anggota DPR yang betul-betul menyebalkan. Sanggahan dari fraksi partai lain tidak diperbolehkan. Selain suara rakyat, ternyata suara rekan sesama politisi pun dibungkam saat ingin memberi interupsi dengan cara mematikan microphone.
- (25) Hal kedua adalah terkait perubahan jadwal sidang yang mendadak diubah dari yang sebelumnya tanggal 8 Oktober menjadi 5 Oktober. Apakah *Omnibus Law* betul-betul semendesak itu? Wajar jika Sherlock langsung memikirkan tentang apa agenda dibalik hal tersebut. Padahal, saat ini kasus penyebaran Covid-19 masih belum bisa diselesaikan dengan baik.

Elemen latar berupa peristiwa mikrofon yang dimatikan dan agenda pengesahan di tengah Covid-19 tersebut seolah mengomunikasikan kepada pembaca bahwa DPR enggan mendengarkan opini dari pihak lain dan terkesan mengesampingkan keselamatan rakyat. Hal tersebut menjadi alasan pendukung untuk melakukan aksi penolakan *Omnibus Law*. Perlawanan atau penolakan juga ditunjukkan melalui diksi yang digunakan untuk melabeli

Omnibus Law, yakni *kebijakan nyeleneh* dan *Omnibus Law sampah*. Diksi *nyeleneh* dan *sampah* tersebut menunjukkan bagaimana *Omnibus Law* dimaknai sebagai sesuatu yang buruk.

Artikel (AP3) juga menunjukkan upaya perlawanan atau penolakan terhadap *Omnibus Law*. Artikel tersebut berisi parodi yang menceritakan dampak dari penerapan *Omnibus Law*. Skema penulisan pada artikel tersebut secara nyata menunjukkan penolakan. Judul yang menggunakan frasa *dampak positif* tersebut merupakan sebuah sindiran. Hal tersebut diidentifikasi dari isi artikel yang justru memaparkan informasi yang bertentangan dengan judul yang digunakan. Poin-poin yang disebutkan dalam artikel tersebut menjelaskan dampak buruk penerapan *Omnibus Law* bagi buruh dan juga bagi alam.

- (26) Sedangkan Kabupaten Kuri, kini seakan menjadi gundukan gurun lantaran tercemar oleh pabrik senjata yang didukung penuh oleh pemerintah. Sungai-sungai air tawar tercemar limbah berbahaya.
- (27) Carut marut seperti ini terjadi ya karena dalam salah satu UU di “*Omnibus Law*kan Antara Wano”, tepatnya pasal 29 mengenai amdal Wano yang dipangkas hingga jadi mekanisme assessment saja. Contohnya ya itu, area Kibi, di mana pabrik-pabriknya terbuat dari batu, tidak sesuai mekanisme amdal yang baik dan benar.
- (28) Banyak buruh di Kota Bakura—pusat Beast Pirates—merana. Aturan ini kian memberatkan mereka. Contohnya nggak ada lagi cuti-cuti (mereka menganggap cuti itu nggak penting), gampang di-PHK, cuti haid nggak ada soalnya (katanya ASU) nggak penting, cuti melahirkan apalagi, pekerjaan Pabrik Smile yang menggunakan sistem kontrak jadi mudah meng-PHK dan semena-mena.

Elemen detil yang menonjolkan dampak buruk penerapan *Omnibus Law* bagi alam atau lingkungan dan bagi para buruh tersebut seolah mengomunikasikan kepada pembaca untuk tidak menyetujui penerapan *Omnibus Law*. Pada elemen stilistik, parodi dalam artikel tersebut ditunjukkan pada kutipan berikut.

- (29) Pertama, ternyata Dewan Perwakilan Rakyat Wano atau yang bisa disingkat ASU, yang diketuai oleh Orochi, King, Queen, dan Jack, bisa juga kerja cepat.
- (30) Melalui penuturan Orochi, dikutip dari Harian New World, “*Omnibus Law* itu, kan, ‘*Omnibus Law*kan Antara Wano’. Nah, itu kan sederhananya aturan baru yang akan memengaruhi aturan-aturan sebelumnya dengan cara lawak. Bagus, dong? Lihat saja, aturan bijak bestari zaman Klan Kozuki, bisa saya ganti dengan mudahnya.”

Pada kutipan (6), Dewan Perwakilan Rakyat Wano disingkat dengan ASU. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan kaidah pemendekan kata. Dalam bahasa Jawa diksi *asu* bermakna anjing dan dalam situasi tertentu digunakan sebagai umpatan. Diksi *asu* menjadi umpatan atau pisuhan yang paling kasar dalam bahasa Jawa (Wijayanti, 2014). Dalam konteks ini, singkatan dalam artikel tersebut merupakan umpatan yang ditujukan pada Dewan Perwakilan Rakyat Wano yang merupakan parodi DPR RI sebagai perancang *Omnibus Law*. Frasa *Lawakan Antara Wano* sebagai kepanjangan dari diksi *law* pada kutipan (7) tersebut juga menggambarkan ketidaksetujuan penulis atas penerapan *Omnibus Law*. Hal tersebut menunjukkan pandangan penulis yang menilai *Omnibus Law* sebagai sebuah lawakan atau lelucon yang diciptakan oleh pemerintah.

Upaya untuk melawan atau menolak *Omnibus Law* juga terlihat pada artikel (AP5). Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut.

- (31) Melalui aturan baru yang mau disahkan tersebut, para superhero muda seperti saya muntab. Walau saya masih sekolah, kelak saya akan menjadi buruh superhero. Begini lho permasalahannya, misalnya mengenai upah. Jasa superhero dibayar per jam sesuai aliansi investor masing-masing. Iya kalau adil, kalau nggak gimana coba? Pun tidak ada izin cuti untuk superhero perempuan yang sedang haid dan hamil. Aneh.

Elemen latar yang membeberkan alasan terjadinya demonstrasi untuk menuntut peraturan yang adil tersebut seakan mengomunikasikan kepada pembaca untuk mendukung tindakan demonstrasi yang dilakukan para superhero. Penggunaan diksi *superhero* untuk menyebut profesi buruh pada artikel tersebut merupakan upaya menentang pandangan masyarakat terhadap buruh. Pada kultur Indonesia, buruh dipandang sebagai pekerja rendahan, kasaran, tidak memiliki kuasa, hina, hanya mengandalkan otot, bergantung pada majikan, dsb. Diksi *superhero* memiliki konotasi orang yang memiliki keberanian dalam membela kebenaran, memiliki kekuatan, dsb. Penggunaan diksi *superhero* untuk menyebut buruh tersebut mengindikasikan adanya upaya untuk mengangkat nilai buruh dalam pandangan masyarakat yang juga menunjukkan keberpihakan penulis pada buruh.

Keberpihakan penulis juga terlihat dari struktur penulisan. Informasi yang disusun pertama kali bukan bagaimana demo berlangsung atau pun dampak dari demo, melainkan alasan yang melatarbelakangi aksi demo besar tersebut. Sementara alasan diciptakannya aturan baru tidak diuraikan secara eksplisit. Hal tersebut menunjukkan bahwa sudut pandang yang digunakan penulis untuk melihat fenomena aturan baru tersebut adalah sudut pandang buruh.

Artikel (AP6) juga merupakan parodi penolakan *Omnibus Law*. Artikel tersebut menceritakan aksi massa yang dilakukan oleh sebuah pasukan bernama Pasukan Revolusioner untuk menuntut keadilan. Indikasi bahwa artikel tersebut merupakan parodi dari aksi demonstrasi penolakan *Omnibus Law* ditunjukkan melalui kutipan berikut.

- (32) Komandan Pasukan dalam Pasukan Revolusi misalkan, yakni Karasu, Belo Betty, Morley, dan Lindbergh, bertugas melancarkan woro-woro melalui media sosial. Bisa saja, kan? Apa sih yang nggak bisa. Mereka bercuit di Twitter dan membangun tagar mulai dari #MosiTidakPercaya hingga #WorldGovernmentKontol.
- (33) Ivankov, selaku dewan terhormat, bisa juga melancarkan aksi sporadis berupa berkomentar di akun @WorldGovernment_OP dengan puisi indah Wiji Thukul, "Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: LAWAN!"

Tagar yang terdapat pada kutipan (9) senada dengan tagar yang menjadi *trending topic* di Indonesia pada 6 Oktober 2020, yakni #MosiTidakPercaya dan #dprkontol. Kedua tagar tersebut merupakan salah satu dari bentuk respons masyarakat yang menolak undang-undang *Omnibus Law*. Respons masyarakat di media massa *Twitter* tidak hanya disampaikan melalui penggunaan tagar, tetapi juga melalui kolom komentar. Kutipan puisi Wiji Thukul pada kutipan (10) tersebut ramai digunakan warganet untuk menyatakan perlawanan terhadap pengesahan *Omnibus Law*.

Struktur penulisan informasi pada artikel tersebut menggambarkan buruknya suatu pemerintahan. Mulai dari adanya pelanggaran HAM hingga lahirnya ketidakadilan, yakni

adanya korupsi dan munculnya undang-undang karet. Hal tersebut akhirnya melahirkan Pasukan Revolusi yang menginginkan perubahan pada tatanan kenegaraan.

- (34) Pemerintah Dunia seakan gali lobang tutup lobang. Mereka menutup rapat kasus HAM zaman lampau, dengan melanggar HAM yang baru. Pepatah lama yang hingga sekarang masih kerap ditemui relevansinya; sejarah dibuat oleh pihak yang menang.
- (35) Ketidakadilan justru datang silih berganti. Pasal-pasal karet diciptakan World Government untuk menyengsarakan rakyat. Bejat!
- (36) Target Pasukan Revolusi adalah menjegal Bangsawan Dunia yang korup, tapi jika target mereka adalah Tenryūbito, jelas Pemerintah Dunia akan pasang badan.
- (37) Di berbagai lini masa, video tindakan represif yang dilakukan oleh aparat—Marine—mulai berkeliaran. Mereka memukul, mementung, dan menendang para bajak laut muda yang baru saja beranjak dewasa. “KEADILAN!” teriak Monkey D. Luffy. “Kami di sini menuntut keadilan abad kekosongan dan muak dengan undang-undang karet yang kalian buat. Cukup badan saya saja yang karet, keadilan ya jangan!”

Citra yang tergambar dari struktur penulisan tersebut adalah fakta bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan adalah bentuk perjuangan untuk menuntut keadilan dan membela rakyat. Struktur penulisan yang demikian juga memarjinalkan posisi pemerintah sebagai pihak yang salah dan harus dilawan. Parodi juga terlihat pada elemen stilistik pada kutipan berikut.

- (38) Semoga tak ada luka, sakit, perih, seperti apa yang dirasakan oleh Ibu Pertiwi jagat One Piece. Cukup kita sudahi sakit itu, keadilan harus menang. Pasal gomu-gomu harus musnah.

Frasa *pasal gomu-gomu* pada kutipan tersebut merupakan parodi dari istilah *pasal karet*. *Gomu* [ゴム] dalam bahasa Jepang berarti karet (Palandi, 2013), sehingga *pasal gomu-gomu* bermakna pasal karet. Pasal karet adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk menyebut pasal yang bersifat multitafsir. Pasal tersebut dapat ditafsirkan secara subjektif oleh penegak hukum atau pihak-pihak lain (Rohmana, 2017). Kutipan tersebut menunjukkan sikap penulis yang menentang adanya pasal karet yang diindikasikan dengan diksi *musnah* yang bermakna hilang atau lenyap.

Cerita tentang buruknya suatu pemerintahan juga terdapat pada artikel (AP7). Hal tersebut terlihat dari kutipan berikut.

- (39) Setelah terpilih, terjadi berbagai perubahan di Konoha terutama di bidang infrastruktur yang dikebut. Walaupun sebagian besar biayanya berasal dari utang, tapi Naruto dengan bangga mengklaim semua pencapaiannya.
- (40) Kini, Konoha dihadapkan dengan masa pergolakan lain setelah selesainya kontroversi pasca pemilihan politisi Hokage. Demo besar-besaran terjadi di berbagai wilayah Konoha menuntut keadilan kepada Naruto dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Konoha.

Struktur kalimat kedua pada kutipan (16) tersebut menonjolkan fakta perihal utang dengan menempatkannya di bagian awal kalimat. Dengan meletakkan informasi tersebut di awal artikel mengindikasikan bahwa penulis ingin menunjukkan kepada pembaca tentang keruhnya kondisi perekonomian dan kacaunya situasi politik di Indonesia setelah pemilihan presiden. Struktur penulisan yang demikian memberikan gambaran buruknya pemerintahan di Indonesia. Gambaran tersebut didukung dengan elemen detil yang memberikan informasi tentang kinerja buruk para politisi.

- (41) Nah, di periode kedua ini lebih banyak polemik yang dibuat oleh Naruto. Sosok yang awalnya dikenal sederhana dan merakyat mulai tergeser dengan label kapitalis dan otoriter. Politik dinasti baru serta bagi-bagi kekuasaan lebih nyata terlihat di periode ini. Shinobi yang nggak kompeten pun dipertahankan.
- (42) Tapi, walaupun orangnya cerdas, Shikamaru ini lebih sering diam. Entah, sadar atau nggak, beliau itu adalah politisi Konoha yang seharusnya membantu tugas dari Hokage. Tapi, beliau malah sering hilang entah kemana. Walaupun hanya sekadar menyapa rakyat Konoha saja jarang.
- (43) “Kepala, pundak, Danzo lagi, Danzo lagi.”
- (44) Meme ini sering muncul di media sosial ketika terjadi pergolakan di rezim Naruto. Sosok Danzo yang lebih vokal dibandingkan dengan Shikamaru, menjadikannya lebih pas jika beliau saja yang menjabat sebagai politisi Konoha pembantu tugas Hokage daripada Shikamaru yang lebih suka diem dan ngilang.
- (45) Statemen Sakura yang absurd ketika di awal virus ini menyerang desa juga sangat bikin jengkel. Mulai dari menyalahkan warga desa yang membeli masker saat awal virus ini terdeteksi yang pada akhirnya menyebabkan harganya menjadi mahal, statemen lainnya yang mengatakan bahwa negara aman dari virus semua berkat kekuatan doa, hingga pernyataannya yang mengatakan bahwa virus ini bisa sembuh sendiri.

Kutipan-kutipan tersebut memparodikan para politisi di Indonesia, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi Indonesia, serta menteri kesehatan (saat itu). Meme yang terdapat pada kutipan (20) merupakan parodi dari meme “Kepala, pundak, Luhut lagi, Luhut lagi” yang sempat menjadi *trending topic* di *Twitter*. Meme tersebut muncul usai penunjukkan Luhut Binsar untuk mengisi kekosongan posisi Kementerian Perikanan dan Kelautan. Kutipan-kutipan tersebut menunjukkan kekecewaan penulis pada pemerintahan yang sedang berjalan. Alasan di balik buruknya pemerintahan Indonesia saat ini diungkapkan pada kutipan berikut.

- (46) Ketika tiba pemilihan untuk menduduki jabatan kursi Konoha 1, Naruto yang dikenal sederhana dan merakyat, melenggang dengan mudah di periode pertama. Sebab, para calon lawannya memiliki track record buruk terhadap HAM, salah satunya terkait pembantaian klan Uchiha. Hal ini menjadikannya sebagai opsi terbaik kala itu untuk dipilih.

Elemen latar yang menguraikan alasan terpilihnya Naruto sebagai *hokage* tersebut seolah mengomunikasikan kepada pembaca bahwa kemenangan Jokowi dalam pemilihan presiden bukan murni kehendak masyarakat, melainkan keterpaksaan, sehingga wajar jika banyak pro-kontra yang akhirnya melahirkan kekacauan dan kekecewaan.

Kekecewaan terhadap presiden sebagai kepala pemerintahan juga terdapat pada artikel (AP4). Perasaan kecewa sekaligus kesal terlihat dari kutipan berikut.

- (47) Namun, beberapa kali kita seakan susah mencari blio di saat keadaan genting. Blio memang gila kerja karena mengusung semboyan mantap, yakni “ngeljain, ngerjain, ngerjain!”. Tapi, bukan berarti ketika masyarakat Mineral Town mencari blio malah blionya nggak ada, dong?
- (48) Ke mana hilangnya Mayor Thomas? Bukankah seorang pemimpin, ketika masyarakat butuh bantuan dan kejelasan, ia hadir dan melakukan dialog massa? Sejatinya kita bisa cari blio mulai dari tempat favorit ia blusukan. Lho, iya to, ketika butuh suara ia mendekati rakyat, mengunjungi rumah ke rumah, mosok waktu dibutuhkan blio menghilang? Doi sebenarnya mayor atau avatar?

Semboyan yang terdapat pada kutipan (23) merupakan parodi dari slogan yang diusung Jokowi pada pidato pertamanya sebagai presiden pada tahun 2014 lalu, yakni “kerja, kerja, kerja”. Slogan tersebut merupakan citra Jokowi yang dikonstruksikan sebagai sosok pekerja dengan karakter sederhana (Rusmulyadi & Hafiar, 2018). Slogan dengan diksi *kerja* tersebut memberikan citra positif pada Jokowi sebagai sosok yang giat bekerja. Sementara diksi *ngerjain* yang digunakan pada kutipan tersebut memberikan citra negatif pada Jokowi. Diksi *ngerjain* memiliki makna yang serupa dengan mengganggu, mengusik, atau membuat usil. Penggunaan diksi tersebut menunjukkan kekesalan penulis atas sikap Jokowi yang “menghilang” saat puncak demonstrasi penolakan *Omnibus Law* sedang berlangsung. Saat itu Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah dalam rangka meninjau lumbung pangan (*food estate*) di Kecamatan Pandih Batu (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2020). Citra negatif Jokowi juga digambarkan pada kutipan berikut.

- (49) Blio juga nggak sungkan berkomunikasi dengan rakyatnya. Cliff yang merupakan pengangguran di Mineral Town saja nggak sungkan ia ajak ngobrol. Sebab, satu suara itu penting di Pilkada Mineral Town.
- (50) Kalau di Mineral Town ada gorong-gorong sanitasi yang becek, bau, dan lembab, saya yakin blio mau masuk. Jangankan masuk, ngubek-ngubek juga sanggup. Ya, dengan catatan ada yang memfotokan, sih. Kan rugi, pakai baju pegawai, masuk gorong-gorong, tapi nggak ada yang foto.

Kalimat terakhir pada kutipan (25) dan (26) tersebut memberikan citra bahwa Jokowi adalah sosok yang pamrih. Penyusunan informasi yang kontras pada kedua data tersebut menunjukkan kepada pembaca bahwa terdapat maksud tersembunyi di balik tindakan yang dilakukan oleh Jokowi, yakni untuk meraih simpati rakyat terutama saat pemilihan umum.

Berbeda dengan enam artikel sebelumnya yang membahas pemerintahan dan kondisi politik saat ini, artikel (AP2) membahas peristiwa sejarah yang diabadikan dalam film dokumenter. Struktur penulisan informasi dalam artikel tersebut membentuk sebuah narasi kebencian. Hal tersebut terlihat dari informasi yang disampaikan di bagian awal artikel (paragraf kedua) berikut.

- (51) Entah pemakaman Danzo kini berada di mana. Jenazahnya dilarung, dikubur, atau bahkan dibiarkan membusuk. Nggak ada yang peduli juga, sih. Sekalipun ada dan dibuatkan sebuah museum penghormatan, saya yakin generasi sakit hati atas tingkahnya ini tiap hari akan berziarah dengan cara mengencingi pemakamannya. Anda mengatakan saya tega menulis seperti ini? Bahkan sepak terjang seorang Danzo ini lebih tega daripada apa yang saya tulis.

Paragraf tersebut membentuk sebuah narasi kebencian yang menunjukkan ketidakpedulian penulis dengan keberadaan makam Danzo. Narasi kebencian yang dibangun di awal artikel tersebut mengindikasikan bahwa rasa yang ingin disampaikan penulis adalah sentimen terhadap tokoh Danzo dengan sepak terjangnya untuk memperoleh kekuasaan sebagai *hokage*. Danzo merupakan parodi dari Soeharto. Hal tersebut terlihat dari kutipan berikut.

- (52) Konoha TV, secara mencengangkan, memutar film berjudul Pengkhianatan Uchiha di bulan September kemarin. Padahal, menurut kajian sejarah, film yang dibuat selama Pemerintahan Danzo—yang menjabat saat itu—hanya fiksi dan jauh akan realitas sesungguhnya. Film tersebut seakan media terbaik untuk keturunan Danzo buat cuci tangan dari dosa masa silam.

Film *Pengkhianatan Uchiha* yang dibuat saat pemerintahan Danzo merupakan parodi dari film *Pengkhiantan PKI* yang dibuat selama pemerintahan Soeharto. Film tersebut merupakan film dokumenter yang menceritakan peristiwa sejarah Gerakan 30 September atau yang dikenal dengan G30S/PKI. Penggunaan diksi *fiksi* sebagai penilaian dari film tersebut menunjukkan bahwa basis kebenaran yang digunakan penulis bertentangan dengan basis kebenaran yang terdapat dalam film.

Narasi kebencian juga terlihat dari diksi yang digunakan untuk menceritakan tindakan yang dilakukan Danzo.

- (53) Film ini mengkhianatkan Klan Uchiha secara luas karena dianggap berkhianat kepada Konoha. Lebih spesifik lagi, film ini menuding sosok Itachi dengan bersimbah darah seraya berkata, “Darah itu merah, Anbu!” sebagai dalang utama. Padahal, ya, sosok Danzo lah yang terlibat banyak dalam perangai pengkhianatan Uchiha. Klan Uchiha membunuh beberapa tokoh terkemuka Konoha, sedangkan Danzo dan Ne melakukan pembalasan dengan pembantaian massal Klan Uchiha.

Penggunaan diksi yang berbeda—*membunuh* dan *pembantaian*—untuk menyebut tindakan menghilangkan nyawa dengan korban lebih dari satu orang tersebut memarginalkan posisi Danzo sebagai orang yang kejam dan secara implisit membenarkan tindakan Klan Uchiha. Kutipan tersebut memarginalkan posisi Soeharto sebagai pihak yang bersalah, yang bertanggung jawab atas peristiwa G30S/PKI. Hal tersebut menunjukkan keberpihakan penulis pada PKI dengan menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan Soeharto lebih kejam dari yang dilakukan PKI. Penggambaran Soeharto sebagai sosok yang kejam didukung dengan diksi-diksi yang disematkan pada Danzo dalam kutipan berikut.

- (54) Itachi adalah sosok yang cinta damai dan dihasut dengan sempurna oleh Danzo si biadab.
(55) Bayangkan saja, seorang anak sekecil Sasuke melihat keluarganya dibunuh atas dasar suruhan si bajingan Danzo

Penggunaan partikel *si* pada kutipan tersebut memberikan kesan merendahkan dan kurang hormat. Pemberian partikel tersebut menentang kesan sosok presiden yang selama ini tertanam di masyarakat, yakni sebagai orang yang berkuasa dan bermartabat. Hal tersebut didukung dengan penggunaan diksi *biadab* dan *bajingan* yang disematkan pada tokoh Danzo. Hal tersebut memberikan citra kepada Soeharto sebagai sosok yang jahat dan kejam.

3.3. Fungsi Parodi

Fungsi parodi dalam artikel rubrik “Terminal” diidentifikasi dengan menggunakan teori fungsi bahasa M.A.K. Halliday. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ditemukan tujuh fungsi bahasa yang terdapat dalam artikel rubrik “Terminal”. Berikut adalah tabel hasil analisis fungsi bahasa.

Tabel 1. Hasil Analisis Fungsi Bahasa

Kode Artikel	Fungsi Bahasa						
	Ins	Reg	Rep	Int	Heu	Per	Ima
AP1			16		2	1	
AP2			11	1		7	1
AP3	1		17		1	9	
AP4			11	2	3	2	3
AP5	2		12			6	
AP6		1	19	1	2	6	
AP7			15			3	
Total	3	1	101	4	8	34	4

Keterangan :

Ins : Instrumental Heu : Heuristik
 Reg : Regulasi Per : Personal
 Rep : Representasi Ima : Imajinatif
 Int : Interaksional

3.3.1. Fungsi Instrumental

Fungsi instrumental merupakan pemakaian bahasa sebagai alat untuk menggerakkan pendengar atau pembaca, memanipulasi lingkungan, serta menyebabkan suatu peristiwa terjadi. Dalam penelitian ini ditemukan tiga fungsi instrumental. Berikut contoh fungsi instrumental pada artikel (AP3).

(56) Mari kita lihat secara saksama, apakah iya Omnibus Law ini sepenuhnya buruk? Dari Masyarakat Wano yang sudah merasakan, mari kita khidmati, dalami, dan kaji lebih dalam lagi.

Kutipan tersebut memiliki fungsi intrumental yang menggerakkan pembaca untuk mengkaji dampak penerapan *Omnibus Law*. Diksi *mari* pada kutipan tersebut merupakan bentuk ajakan penulis kepada pembaca untuk secara bersama-sama mencermati kembali dampak apa saja yang akan ditimbulkan dari penerapan *Omnibus Law*.

3.3.2. Fungsi Regulasi

Fungsi regulasi merupakan pemakaian bahasa yang mengatur tingkah laku orang lain atau mengendalikan suatu peristiwa. Dalam penelitian ini ditemukan satu fungsi regulasi, yakni terdapat pada kutipan artikel (AP6) berikut.

(57) Tapi hati-hati saja ketika ada yang kebakaran. Entah fasilitas umum atau hutan ribuan hektar, bisa saja yang disalahkan Sabo, panglima aksi.

Pada kutipan tersebut penulis mengendalikan suatu peristiwa dengan mengimbau Pasukan Revolusi yang mengikuti aksi demonstrasi untuk berhati-hati karena mereka rawan dijadikan sebagai pihak pihak yang disalahkan dalam sebuah kasus kebakaran, terutama pemimpin pasukan mereka. Diksi *hati-hati* pada kutipan tersebut memberikan imbauan untuk berbuat waspada.

3.3.3. Fungsi Representasi

Fungsi representasi melihat bahasa sebagai alat untuk membicarakan suatu objek atau peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Fungsi ini paling banyak ditemukan dalam artikel

rubrik “Terminal”. Berikut salah satu contoh fungsi representasi yang terdapat pada artikel (AP7).

- (58) Target Pasukan Revolusi adalah menjegal Bangsawan Dunia yang korup, tapi jika target mereka adalah Tenryūbito, jelas Pemerintah Dunia akan pasang badan.

Kalimat tersebut memiliki fungsi representasi, yakni memberikan informasi kepada pembaca. Setidaknya terdapat tiga informasi yang diperoleh dari kutipan tersebut, yakni informasi tentang target Pasukan Revolusi dan informasi tentang pengaruh atau kekuasaan Tenryūbito sehingga Pemerintah Dunia patuh padanya. Selain itu, dari kutipan tersebut juga didapatkan informasi bahwa terdapat praktik korupsi yang terjadi di lingkup Bangsawan Dunia.

3.3.4. Fungsi Interaksional

Fungsi interaksional merupakan pemakaian bahasa yang berorientasi pada hubungan antarpihak yang melakukan komunikasi. Fungsi tersebut digunakan untuk memulai suatu komunikasi dan membuat komunikasi lebih akrab. Terdapat empat fungsi interaksional yang ditemukan penelitian ini. Berikut merupakan kutipan yang menunjukkan fungsi interaksional dalam artikel (AP4).

- (59) Bisa jadi, jika mereka hidup di masa kini, Kano bertugas jadi admin Instagram Mayor Thomas. Layaknya film propaganda, Instagram adalah citra di masa kini, Bung.

Fungsi interaksional pada kutipan tersebut ditunjukkan dengan adanya penggunaan diksi *bung*. Diksi tersebut merupakan salah satu deiksis sosial, yakni penggunaan bahasa yang didasarkan pada status sosial partisipan dan juga jarak antara penutur dan petutur (Budiman, Sujinah, & Ngatma'in, 2016). Diksi *bung* merupakan deiksis sosial yang digunakan sebagai bentuk penghormatan atau sebagai bentuk keakraban. Diksi tersebut dapat digunakan sebagai bentuk kata ganti orang kedua jamak atau orang ketiga tunggal. Dalam konteks kalimat pada kutipan tersebut, diksi *bung* digunakan sebagai kata ganti orang kedua bentuk jamak. Penggunaan diksi *bung* pada kalimat tersebut berfungsi sebagai bentuk panggilan yang menunjukkan keakraban antara penutur dan petutur. Melalui diksi tersebut penulis berusaha menjalin keakraban dengan pembaca.

3.3.5. Fungsi Heuristik

Fungsi heuristik digunakan sebagai alat untuk menyelidiki suatu realitas atau memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini ditemukan delapan fungsi heuristik. Berikut adalah salah fungsi heuristik yang ditemukan pada kutipan artikel (AP1).

- (60) Hal kedua adalah terkait perubahan jadwal sidang yang mendadak diubah dari yang sebelumnya tanggal 8 Oktober menjadi 5 Oktober. Apakah Omnibus Law betul-betul semendesak itu?

Fungsi heuristik pada data tersebut ditunjukkan dengan adanya penggunaan kalimat tanya. Kata tanya *apakah* pada kalimat *Apakah Omnibus Law betul-betul semendesak itu?* menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat tanya konfirmasi. Kalimat tanya konfirmasi merupakan kalimat tanya yang disampaikan untuk tujuan mengukuhkan atau memperjelas suatu persoalan (Perdana, 2013). Dalam konteks ini, kalimat tanya pada data

tersebut digunakan untuk memperjelas persoalan atau realitas terkait dengan tentang tingkat urgensi *Omnibus Law* sehingga mengharuskan pelaksanaan sidang dimajukan tiga hari lebih cepat dari jadwal seharusnya.

3.3.6. Fungsi Personal

Fungsi personal merupakan penggunaan bahasa yang berorientasi pada penutur. Fungsi personal memberikan kesempatan kepada pengguna bahasa untuk mengungkapkan perasaan atau emosi melalui bahasa. Fungsi ini cukup banyak ditemukan dalam artikel rubrik “Terminal”, yakni sebanyak tiga puluh empat data. Berikut salah satu fungsi personal yang ditemukan pada artikel (AP3).

- (61) Padahal, beberapa bulan sebelumnya, kehendak rakyat yang menuntut ASU untuk merancang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS, lantaran di Wano rawan terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh anggota Beast Pirates, tidak digubris blas oleh ASU. Benar-benar mencerminkan ASU.

Data tersebut merupakan ungkapan ekspresi penulis berupa rasa marah atau jengkel. Hal tersebut ditunjukkan dengan penggunaan diksi *asu* pada *kalimat Benar-benar mencerminkan ASU*. Dalam konteks ini, diksi *asu* digunakan sebagai umpatan yang mengekspresikan perasaan marah atau jengkel. Perasaan tersebut merujuk pada tindakan Dewan Perwakilan Rakyat Wano—dalam artikel tersebut disingkat menjadi ASU—yang mengabaikan RUU PKS yang dituntut masyarakat.

3.3.7. Fungsi Imajinatif

Fungsi imajinatif merupakan pemakaian bahasa untuk mengekspresikan daya imajinasi dan kreativitas seseorang. Terdapat empat fungsi imajinatif yang ditemukan dalam penelitian ini. Berikut adalah salah satu kutipan yang menunjukkan fungsi imajinatif pada artikel (AP4).

- (62) Ketika masyarakat mencari dirinya, meminta penjelasan mengenai beberapa konflik di Mineral Town, dan undang-undang yang ditetapkan bawahan Mayor Thomas, mungkin ia sedang berada di kampung halamannya. Di rumahnya. Sembari minum teh hangat, ditemani bisikan bijak sang istri, dan menyadarkan diri bahwa sanak saudaranya juga rakyat, ia menguatkan hati untuk turun menghadapi rakyat yang sedang mencarinya.

Data tersebut menunjukkan fungsi imajinatif berupa khayalan atau imajinasi penulis tentang keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Mayor Thomas. Dalam imajinasi tersebut Mayor Thomas diceritakan sedang berada di kampung halaman bersama istrinya, lalu sadar bahwa dirinya harus menemui rakyat yang mencarinya. Imajinasi tersebut menggambarkan harapan penulis perihal tindakan Mayor Thomas dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Mineral Town, yakni dengan menemui dan mendengarkan rakyatnya.

4. Simpulan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa topik parodi yang dibahas dalam rubrik “Terminal” relevan dengan berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia. Makna dari parodi tersebut merepresentasikan terutama kondisi politik Indonesia. Parodi dalam artikel tersebut berfungsi sebagai bentuk ekspresi masyarakat dalam merespons fenomena-fenomena yang menimbulkan keresahan dan ramai dibicarakan publik.

Penelitian ini dapat diimplikasikan dalam kegiatan membaca kritis. Dengan menganalisis topik, makna, serta fungsi suatu wacana, maka pembaca akan dapat memahami maksud atau pesan yang disampaikan penulis secara eksplisit maupun implisit. Memahami maksud suatu wacana, terutama wacana parodi, dapat meningkatkan sensibilitas pembaca terhadap fenomena yang sedang terjadi di masyarakat karena parodi merupakan cara menanggapi secara evaluatif tentang sesuatu yang disampaikan maupun tentang peristiwa yang sudah atau sedang terjadi. Penelitian ini juga menjadi upaya untuk meningkatkan apresiasi terhadap karya tulis.

Parodi memiliki sifat ambivalen dan multitafsir sehingga selalu menarik untuk dikaji, baik parodi dalam karya sastra, artikel, teks berita dsb. Parodi juga telah banyak digunakan sebagai media kritik. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengkaji lebih dalam tentang aspek intertekstualitas artikel dalam rubrik “Terminal” pada situs *Mojok.co* dengan wacana atau karya-karya terdahulu.

Daftar Rujukan

- Budiman, A., Sujinah, & Ngatma'in (2016). Deiksis sosial kumpulan esai buku Republik #Jancukers karya Sujiwo Tejo. *Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 9(2), 80–100. doi: <http://dx.doi.org/10.30651/st.v9i2.1177>
- Eriyanto. (2011). *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media*. Yogyakarta: LkiS.
- Kostka, V. (2016). Linda Hutcheon's theory of parody and its application to postmodern music. *AVANT: Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej*, 8(1), 67–73. doi:10.26913/70102016.0111.0003
- Kustiyono, P.S. (2010). *Strategi resistensi terhadap budaya populer pada kolom “Parodi” Samuel Mulia di harian Kompas (sebuah analisis wacana kritis)* (Master's thesis, UNS (Sebelas Maret University), Surakarta). Retrieved from <https://eprints.uns.ac.id/4506/1/170061611201011021.pdf>
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2005). *Kajian wacana: Teori, metode & aplikasi prinsip-prinsip analisis wacana*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Palandi, E. H. (2013). Kata serapan dalam bahasa Jepang: Upaya bangsa Jepang dalam pemeliharaan bahasa dan terjadinya pergeseran bahasa sesuai budaya lokal. *International Seminar “Language Maintenance and Shift III”*. 182–186. Retrieved from <http://eprints.undip.ac.id/54397/>
- Perdana, R. I. (2013). *Penggunaan kata tanya bahasa Indonesia dalam cerpen di harian umum Kompas*. (Undergraduate thesis, Universitas Negeri Yogyakarta). Retrieved from <https://eprints.uny.ac.id/22261/>
- Rohmana, N.Y. (2017). Prinsip-prinsip hukum tentang tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia. *Yuridika*, 32(1), 105–133. doi: <http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4831>
- Rusmulyadi, R., & Hafiar, H. (2018). Dekonstruksi citra politik Jokowi dalam media sosial. *PROfesi Humas*, 3(1), 120–140. doi: <https://doi.org/10.24198/prh.v3i1.16729>
- Sekreratriat Kabinet Republik Indonesia. (2020). *Presiden akan tinjau food estate di Kalteng*. Retrieved from <https://setkab.go.id/presiden-akan-tinjau-food-estate-di-kalteng/>.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarlam. (2003). *Teori dan praktik analisis wacana*. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Ulva, R. (2014). Dara Jingga, Wisran Hadi: Parodi terhadap kekuasaan (Dara Jingga, Wisran Hadi: A power parody). *SALINGKA: Majalah Ilmiah Bahasa dan Sastra*, (12), 51–63. Retrieved from <http://salingka.kemdikbud.go.id/index.php/SALINGKA/article/view/33>
- Wijayanti, K.D. (2014). Bentuk dan fungsi pisuhan bahasa Jawa: Suatu kajian sosiopragmatik. *Proceedings of International Seminar Language Maintenance and Shift IV*, 180–183. Retrieved from <http://eprints.undip.ac.id/54589/>